

BOOK REVIEW

Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional

Pengarang : Sulaiman Hamid, S.H.
Penerbit : PT Raja Grafindo Persada
Tahun Terbit : Januari 2002
ISBN : 979-421-861-8
Peresensi : Sindy Fathan, S.H.



Ditengah masyarakat modern seperti saat ini, masih banyak terdapat negara yang mengalami konflik atau pertentangan antarindividu maupun kelompok, atau pertentangan antara sekelompok masyarakat dengan pemerintah yang sah. Hal ini terkadang menyebabkan adanya ancaman dan tekanan atas hak, kebebasan, martabat, dan nasib warga negaranya. Keadaan tersebut seringkali memaksa warganegara tersebut mengajukan perlindungan kepada negara lain, guna menjamin kelangsungan hidupnya. Semakin banyaknya peristiwa-peristiwa konflik internasional dan konflik non-internasional, sehingga terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di berbagai belahan dunia, mengakibatkan masalah-masalah terkait dengan pencari suaka bermunculan. Masalah-masalah ini membutuhkan perhatian masyarakat internasional. Berangkat dari hal ini, penulis buku ini yang pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengumpulkan beberapa kutipan, bahan-bahan perkuliahan dan potongan berita berdasarkan pengalaman penulis, kedalam satu buku yang memuat secara singkat dan padat mengenai lembaga suaka, dilihat dari kacamata hukum internasional.

Bab I dari buku ini membahas mengenai kutipan-kutipan berita dari surat kabar harian nasional yang meliput mengenai suaka di seluruh dunia. Permintaan suaka kerap terjadi dengan berbagai motivasi dan latar belakang. Berita-berita yang kebanyakan diambil dari Harian Terbitan Medan ini, antara lain mengenai pemberian suaka kepada 80 – 100 orang anggota Gerakan Aceh Merdeka di Swedia, eksodus warga negara Indonesia ke Malaysia pasca Kerusuhan Mei 1998, pemberian suaka kepada mantan Presiden Guinea Bissau, Joao Bernardo Vieira, oleh Portugal, dan mengenai 40.000 pengungsi Kosovo di Albania. Kutipan-kutipan berita tersebut disajikan dalam rangka memberikan perbedaan antara istilah-istilah yang dapat dikategorikan kedalam permintaan suaka (*asylum*). Adapun dalam hukum internasional, istilah-istilah ini memiliki arti yang berbeda, namun orang awam sering menyamakannya.

Didalam bab II buku ini, dibahas pengertian dari masing-masing istilah serta pembatasannya. Istilah suaka dan pengungsi, dalam hukum internasional, memiliki perbedaan, begitu juga istilah eksodus, dan evakuasi. Dalam bab ini, dijabarkan mengenai asal-usul istilah *asylum*, pengertiannya dalam hukum internasional serta pendapat dari ahli hukum internasional. Penggunaan istilah eksodus dan evakuasi, yang digunakan dalam surat kabar harian, sering disalah artikan oleh orang awam, karena penggunaan kedua istilah ini dianggap kurang tepat dalam konteks lembaga suaka.

Pembahasan dalam bab III buku ini dititikberatkan pada jenis-jenis suaka. Suaka dibagi kedalam 2 jenis yaitu suaka teritorial dan suaka diplomatik. Pembagian jenis suaka ini awalnya dikenal setelah kasus "*Peruvian and Colombian Asylum Case*". Selain itu, dipaparkan pula ragam suaka bila dilihat dari jangka waktu pemberiannya, yaitu *Temporary Asylum* dan *Definitive Asylum*. Dalam memperkuat pemaparannya, penulis juga memberikan contoh-contoh kasus mengenai ragam suaka ini, seperti kasus pembangkang asal RRC, Fang Li Zhi yang meminta suaka dari Kedutaan Inggris, sebagai contoh dari *Temporary Asylum*. Pembahasan suaka dalam buku ini hanya terletak pada jenis suaka yang dilihat dari bentuk pemberiannya.

Pada bab IV buku ini, dibahas permasalahan mengenai karakteristik suaka. Bagaimana cara pemberiannya, kepada siapa saja dan kapan suatu suaka dapat diberikan, merupakan salah satu dari beberapa karakteristik atau prinsip umum suaka yang dibahas. Dalam bab ini, penulis memberikan satu contoh kasus yang diambil dari majalah *Gatra*, mengenai penolakan permohonan suaka yang diajukan oleh seorang staf diplomatik Kedutaan Indonesia di Afrika Selatan.

Bab V, yang berjudul Hak Mencari dan Menikmati Suaka dari ancaman Persekusi, dibahas pengertian Pasal 5 dan 14 Deklarasi HAM (*Universal Declaration on Human Rights*), Pasal 7 Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), dan Pasal 3 Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Berprikemanusiaan dan Merendahkan Martabat Manusia (*International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Ketiga pasal ini merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk mengajukan permohonan suaka. Oleh karena itu, negara yang dimohonkan suaka harus mengabulkan permohonan tersebut apabila kelangsungan hidup si pemohon terancam di negara asalnya. Negara yang dimohonkannya itu tidak berhak mengembalikan si pemohon ke negara asalnya (prinsip *non-refoulement*). Penulis juga berpendapat bahwa pada prakteknya, terdapat kesepakatan internasional dalam memberikan jaminan atau keamanan seseorang merupakan hak setiap negara, maka pemberian suaka merupakan hak negara bukan hak individu. Oleh karena itu, pemohon suaka biasanya beralih kewarganegaraan sebagai warga negara pemberi suaka. Dalam menggambarkan masalah suaka, Penulis membandingkan dengan permohonan kewarganegaraan yang diajukan oleh imigran, namun yang membedakannya adalah latar belakang permohonan tersebut. Pada Bab VI Penulis menarik kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

Buku ini amat menarik untuk dibaca oleh masyarakat umum, meski sasaran utama pembaca buku ini hanya mahasiswa, praktisi dan akademisi di bidang Hukum Internasional. Dalam

pemaparan materi mengenai lembaga suaka ini, Penulis juga menambahkan beberapa lampiran berupa dasar hukum nasional dan internasional mengenai lembaga suaka. Penjelasan dalam buku ini begitu singkat, sehingga masih terdapat pembahasan yang kurang mendalam dalam beberapa bentuk permasalahan suaka, seperti masalah mengenai pengungsi (*refugee*).